

Resistensi Petani Kendeng: Dinamika Perubahan Struktur Sosial terhadap Perlawanan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang

Ahmad Rofiul Khoir

Progam Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia
ahmadrofiulkhoir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dinamika konflik dan perubahan struktur social serta strategi serta metode apa saja yang digunakan oleh Gerakan Petani Kendeng dalam melawan pembangunan pabrik semen. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini penulis juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Gerakan Petani Kendeng dalam menanggapi rencana pembangunan pabrik di Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Peneliti menguraikan data dengan cara menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta-fakta secara mendalam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Gerakan Petani Kendeng menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan hak-hak mereka sebagai masyarakat lokal. Tindakan mereka mencerminkan konflik yang melekat dalam dinamika masyarakat dan keberlanjutan lingkungan serta peran teori konflik dalam memahami perbedaan kepentingan dan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut

Kata Kunci: Gerakan Perubahan Sosial, Konflik, Struktur Sosial, Petani Gendeng

Abstract

This research is to find out what strategies and methods are used by the Kendeng Farmers Movement to fight against the construction of a cement factory. Not only that, in this research the author also aims to find out how the Kendeng Farmers Movement responded to plans to build a factory in Rembang. This research is qualitative research using a library approach. The library approach is research in which data collection is carried out by compiling data from various literature. The literature studied is not limited to books but can also include documentation materials, magazines, journals and newspapers. Researchers describe data by investigating, finding, describing and explaining facts in depth. The conclusion of this research is that the Kendeng Farmers Movement shows a commitment to environmental sustainability, social justice and their rights as local communities. Their actions reflect the conflict inherent in societal dynamics and environmental sustainability as well as the role of conflict theory in

understanding the differences in interests and views between the parties involved in the conflict.

Keywords: *Social Change Movement, Conflict, Social Structure, Gendeng Farmers*

Pendahuluan

Dalam konteks Negara berkembang, kehidupan masyarakat sipil seringkali dihadapkan pada problematika kesejahteraan sosial. Problematika tersebut cenderung muncul sebagai hasil dari pengembangan narasi kesejahteraan yang bersifat ekonomistik, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama. Hal ini sering mengakibatkan kawasan-kawasan yang dianggap miskin menjadi target proyek-proyek pembangunan. Investasi pertambangan skala besar dianggap perlu, karena keberadaan perusahaan besar untuk mengeksploitasi tambang dianggap sebagai bagian integral dari proyek pembangunan, bahkan dianggap sebagai komponen dari skema pengentasan kemiskinan. Meskipun narasi-narasi semacam ini tidak baru, namun dalam sejarah pertambangan dunia, pemimpin daerah atau negara seringkali menggunakan klaim-klaim serupa. Sayangnya, kesejahteraan yang diimajinasikan dalam konteks ini seringkali tidak terwujud dengan optimal.

Di Indonesia pada masa Orde Baru, pintu terbuka bagi investor asing untuk meningkatkan industrialisasi di negeri ini melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Paradigma pembangunan yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru, didukung oleh kerangka hukum yang formal dan positivistik, lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan investasi modal asing melalui langkah besar-besaran industrialisasi. Kebijakan industrialisasi yang diterapkan pada masa Orde Baru memiliki implikasi tidak langsung yang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensi dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari peningkatan permintaan lahan yang signifikan, yang umumnya dimiliki oleh rakyat tanpa tanda kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan hukum Negara. Hal ini menjadi tempat yang cukup besar untuk menanamkan investasi. Oleh karena itu, Negara diharapkan memberikan jaminan hukum untuk memfasilitasi kebutuhan lahan tersebut.

Namun, hal ini memunculkan konflik pertahanan antara rakyat dengan Negara yang didukung oleh perangkatnya, seperti birokrasi dan keamanan Negara. Setelah lengsernya Suharto dan berakhirnya era Orde Baru, terjadi perubahan paradigma

kebijakan pembangunan di Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan pasca Reformasi, di mana masyarakat Indonesia mengakui reformasi terhadap tatanan Negara, tidak mengalami pasang surut, melainkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Salah satu bukti nyata dari perkembangan ini adalah adanya privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN, yang merupakan konsep yang dikembangkan oleh IMF, tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, tetapi juga secara langsung ditujukan untuk mengubah status kepemilikan BUMN menjadi perusahaan swasta. Tujuan akhir dari privatisasi BUMN adalah praktik produksi tanpa intervensi langsung dari pemerintah Indonesia.

Negara Indonesia menghadapi paradoks dalam kondisi ekonomi yang ada. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945, secara normatif, Indonesia mengukung sistem ekonomi demokrasi atau ekonomi kerakyatan. Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang vital untuk negara dan mencakup kebutuhan hidup banyak orang harus dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alamnya juga harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, regulasi yang tercantum dalam UUD tidak dapat diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia karena keterlibatan negara dalam World Trade Organization (WTO). Keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut mendorong beberapa BUMN yang berkinerja baik untuk tidak memerlukan bantuan modal dan malah membuka investasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan poin dalam Letter of Intent (LoI), yaitu privatisasi BUMN. Kebijakan ini mencakup BUMN yang terlibat dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, seperti contohnya PT.SI (Semen Indonesia). Dampak privatisasi BUMN di sektor pertambangan dapat terlihat dari peningkatan produksi semen di Indonesia. Salah satu bukti dari peningkatan ini dapat diamati dari penyebaran produksi semen di Pulau Jawa.

Tindakan konkret dari peningkatan produksi tersebut terlihat dalam rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara. Pada praktiknya, skema pembebasan Pegunungan Kendeng Utara diubah dari kawasan lindung menjadi kawasan industri semen. Pembebasan lahan tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan negara melakukan ekspansi dengan mengambil alih tanah milik rakyat untuk kepentingan modal. Secara praktis, rencana pembangunan pabrik ini melibatkan empat lokasi, yaitu PT. Sahabat Sakti/ PT. Indocement di Pati, PT Vanda Prima Lestari di

Grobogan, PT. Imasco Tambang Raya di Blora, dan yang menarik perhatian publik hingga saat ini adalah PT Semen Indonesia di Rembang. 4 Dimulai dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Rembang yang mengizinkan transformasi kawasan lindung menjadi kawasan industri pabrik semen, terlihat seolah-olah terdapat kontradiksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pegunungan Watu Putis merupakan sumber mata air yang vital bagi penduduk setempat. Kondisi ini direspons oleh masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Respons yang diberikan melibatkan pernyataan penolakan terhadap pendirian dan aktivitas penambangan pabrik semen di Rembang. Pertanyaan seputar hal tersebut diiringi dengan tuntutan untuk menghentikan seluruh proses terkait pembangunan pabrik semen. Tak hanya sampai di situ, JMPPK juga mengajukan permintaan kepada pemerintah Kabupaten Rembang untuk meninjau kembali dan mematuhi peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rt/Rw pasal 63, serta peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 pasal 19 tentang Rt/Rw Kabupaten Rembang, yang menyatakan bahwa Sekungan Watu Putih adalah kawasan imbuhan air dan kawasan lindung geologi. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Rembang terkait Gerakan Sosial yang dilakukan oleh masyarakat dapat didefinisikan sebagai fenomena yang bersifat parallel.

Sebagai contoh, bagaimana JMPPK sebagai gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara, pada dasarnya bukanlah fenomena baru. Meskipun bukan fenomena yang baru, gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara secara umum memberikan kesan bahwa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sudah terkesan sebagai gerakan yang bersifat intelektual atau gerakan sosial yang memiliki konsep yang jelas. Fokus permasalahan yang ingin dijelajahi oleh penulis adalah untuk mengetahui strategi dan metode yang digunakan oleh Gerakan Petani Kendeng serta dampaknya terhadap struktur social masyarakat dalam menentang pembangunan pabrik semen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana Gerakan Petani Kendeng merespons rencana pembangunan pabrik di Rembang.

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang mencakup serangkaian langkah terkait dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola data secara obyektif, analitis, dan kritis mengenai Gerakan Petani Kendeng dalam Menentang Pembangunan Pabrik Semen di Rembang. Persiapan penelitian ini paralel dengan penelitian lainnya, tetapi pengumpulan data dilakukan melalui sumber literatur dengan mengakses pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian terkait variabel dalam penelitian ini.

Penelitian studi literatur ini dilakukan dengan analisis yang cermat dan mendalam untuk memastikan hasil yang obyektif mengenai Gerakan Petani Kendeng dalam Menentang Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng. Data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat sekunder, berupa hasil penelitian dari buku, jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Proses analisis data dimulai dengan mengevaluasi hasil penelitian yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Peneliti kemudian membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu untuk menilai sejauh mana permasalahan yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan relevan terkait dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Strategi dan Metode yang Ditempuh Oleh Petani Kendeng dalam Melawan Pembangunan Pabrik Semen

Gerakan Petani Kendeng menjadi topik hangat pada zamannya. Fenomena ini dipicu oleh adanya proyek pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, dengan total luas lahan yang dialokasikan mencapai 180 hektar untuk pabrik, 2.025 hektar untuk tambang batu kapur, dan 663 hektar untuk tambang tanah liat. Lahan yang akan digunakan untuk proyek pabrik semen ini melibatkan tanah milik penduduk lokal, tanah desa yang merupakan aset negara, serta lahan perhutani yang dikelola oleh masyarakat. Luasnya lahan yang akan digunakan untuk

pembangunan pabrik semen menuai kontroversi di masyarakat karena dapat merusak lingkungan, meskipun ada masyarakat yang pro terhadap kasus ini. Tetapi, lebih banyak masyarakat yang kontra mengenai pembangunan pabrik semen ini sehingga memunculkan gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi oleh para petani Kendeng.

Gerakan petani Kendeng digambarkan sebagai gerakan sosial baru. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, gerakan ini muncul sebagai tanggapan dari masyarakat sipil yang merasa hak-haknya diabaikan. Kedua, gerakan ini berhadapan dengan kapitalisme secara global dan langsung, di mana PT Sahabat Mulia Sakti, perusahaan transnasional adalah anak perusahaan yang berasal dari Jerman. Ketiga, perlawanan ini menentang tirani kekuasaan—perusahaan milik negara (PT Semen Indonesia) dan pemerintah provinsi serta daerah. Gerakan petani Kendeng ini ditunjukkan dalam kasus perjuangan petani di pegunungan Kendeng yang melihat adanya ancaman terhadap norma-norma petani yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Kelestarian alam adalah salah satunya, dimana dalam kehidupan subsistensi mereka, tidak pernah kemudian memanfaatkan alam dengan cara dirusak atau bersifat berlebihan.

Petani selalu memiliki cara agar sawah-sawah yang mereka garap tetap menghasilkan dan menjadi lumbung hidupnya, yaitu 10 dengan cara menghormati, merawat dan melestarikan agar alam di pegunungan Kendeng terus terjaga dan dapat dimanfaatkan hingga kegenerasi-generasi berikutnya (Asrawijaya, 2020). Dengan datangnya proyek pembangunan pabrik semen ini memunculkan perubahan lingkungan alam sekitar. Alam yang dianggap sebagai ibu bumi oleh para petani Kendeng dieksploitasi untuk kepentingan pemerintah, sehingga masyarakat-masyarakat kecil terabaikan hak-haknya. Para petani di Kendeng melakukan perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen melalui berbagai strategi dan aksi, mereka mencoba menempuh berbagai macam cara untuk menghentikan proyek pembangunan pabrik semen, mulai dari cara yang sederhana hingga cara yang langsung meghadap ke pemerintah.

Beberapa strategi dan tindakan yang dilakukan petani Kendeng antara lain: (1) demonstrasi, para petani melakukan berbagai bentuk demonstrasi, seperti mengirimkan surat protes atas persetujuan pabrik semen, menolak peraturan

daerah, melakukan long march, dan berdemonstrasi di pengadilan. (2) tindakan hukum, para petani telah menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan tuntutan hukum dan banding, untuk menentang pembangunan pabrik semen. Mereka telah membawa kasusnya ke Mahkamah Agung dan berhasil dalam beberapa kasus, sehingga berujung pada pembatalan izin lingkungan untuk pabrik semen tersebut. (3) gerakan sosial, para petani mengorganisir gerakan sosial untuk menentang pembangunan pabrik semen. Mereka telah mencari bantuan hukum untuk menuntut keadilan dan telah memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk melindungi lingkungan dan kehidupan mereka.

Salah satu gerakan yang mereka lakukan adalah dengan menyemen kaki mereka didepan istana negara sebagai bentuk perlawanan agar pemerintah mau membatalkan proyek ini. (4) advokasi dan keterlibatan kebijakan, para petani telah terlibat dalam upaya advokasi untuk mempengaruhi kebijakan terkait perlindungan lingkungan dan penggunaan lahan. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran mengenai dampak pabrik semen terhadap lingkungan setempat dan melakukan advokasi untuk pelestarian sumber daya alam. (Asrawijaya, 2020). Para petani di Kendeng telah menunjukkan ketahanan dan tekad dalam upaya mereka menolak pembangunan pabrik semen, dengan menggunakan strategi gabungan mulai dari hukum, sosial, dan advokasi untuk melindungi tanah, mata pencaharian, dan lingkungan mereka.

b. Gerakan Petani Kendeng Menanggapi Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Rembang

Gerakan Petani Kendeng memberikan respons yang tegas dan penuh perlawanan terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Gerakan ini mengidentifikasi potensi dampak negatif pembangunan pabrik semen di Rembang terhadap lingkungan, khususnya yang dapat merugikan sektor pertanian tempat masyarakat Kendeng menggantungkan kehidupannya. Gerakan Petani Kendeng telah merespons rencana pembangunan pabrik semen dengan langkah-langkah konkret, termasuk melakukan gerakan sosial untuk menolak proyek tersebut, mencari dukungan hukum untuk mengejar keadilan, dan melaporkan kegiatan perusahaan ke pihak berwajib atas dugaan tindakan pidana.

Selain itu, mereka juga melakukan aksi protes dengan merendamkan kaki

mereka dalam semen di depan Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bentuk simbolik persetujuan terhadap pembangunan pabrik semen yang diyakini akan merusak lahan pertanian dan lingkungan. Gerakan Petani Kendeng menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam menyuarakan komitmen mereka terhadap isu pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. Tindakan mereka mencerminkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. (Asrawijaya, 2020).

Gerakan Petani Kendeng menolak proyek pembangunan pabrik semen di Rembang dengan menyajikan sejumlah argumentasi yang mendalam. Proyek tersebut, yang melibatkan penambangan batu gamping di pegunungan karst, dianggap dapat mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan udara yang telah menjadi sumber kehidupan untuk berbagai keperluan. Rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lahan pertanian dan lingkungan, sementara sejumlah pabrik semen yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun belum mendapatkan kajian dampak yang komprehensif. Pengelolaan limbah pabrik semen sering meninggalkan galian yang dapat menyebabkan kekeringan di banyak daerah.

Pegunungan Kendeng merupakan lumbung pangan bagi penduduk sekitar dan memiliki sumber mata air yang vital. Oleh karena itu, pembangunan pabrik semen berpotensi mengancam mata pencaharian masyarakat petani di sekitar wilayah tersebut. Selain itu, penolakan tersebut didasarkan pada ketidak-konsultasian pemerintah dengan masyarakat sebelum memberikan izin untuk 12 pembangunan pabrik semen. Argumentasi-argumentasi ini menjadi landasan bagi Gerakan Petani Kendeng dalam menolak rencana pembangunan pabrik semen, dan tindakan mereka mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. (Asrawijaya, 2020).

c. Dampak Gerakan dan perlawanan masyarakat kendeng terhadap Struktur Sosial Masyarakat Kendeng.

Pada prinsipnya, upaya kolektif dan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng terhadap kerangka sosial komunitas mereka mencerminkan respons terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh entitas sosial tersebut. Gerakan ini umumnya timbul sebagai hasil tanggapan terhadap

pelaksanaan proyek-proyek pembangunan atau formulasi kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan atau menghadirkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, atau hak-hak tradisional yang mereka anut. Dalam konteks ini, beberapa konsekuensi yang timbul akibat gerakan dan perlawanan masyarakat terhadap kerangka sosial dapat meliputi:

1. Meningkatnya Partisipasi dan solidaritas Masyarakat

Meningkatnya partisipasi dan solidaritas masyarakat dalam gerakan perlindungan lingkungan dihadapkan pada dua dinamika krusial. Pertama, pemobilisasi sosial yang diusung oleh gerakan ini berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat, dari petani hingga aktivis lingkungan, pemuda, dan pemimpin masyarakat. Sinergi ini tidak hanya menciptakan kekuatan kolektif, tetapi juga menunjukkan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam upaya perlindungan lingkungan. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat yang muncul dari perlawanan terhadap proyek-proyek merugikan menggambarkan dorongan kuat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat tidak lagi menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam dialog dengan pemerintah. Hal ini mencerminkan semangat partisipatif yang dapat merangsang pemecahan masalah bersama, di mana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan atau hak-hak mereka. Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya menjadi wadah untuk ekspresi kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga motor penggerak transformasi sosial yang membawa dampak positif pada partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kesadaran Lingkungan dan Menguatnya Identitas Lokal Masyarakat Kendeng

Partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan di kalangan masyarakat Kendeng tidak hanya menjadi katalisator bagi peningkatan kesadaran akan perlunya menjaga ekosistem lokal, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga memperkuat identitas lokal mereka. Gerakan ini berhasil menyuntikkan pemahaman mendalam akan pentingnya melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, perlawanan terhadap proyek-

proyek yang dianggap merugikan mampu memicu refleksi lebih dalam terkait nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Kendeng.

Dengan menyadari warisan budaya dan alam yang mereka miliki, masyarakat menjadi semakin tanggap terhadap tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan melestarikan aset-aset berharga tersebut. Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya menciptakan dampak positif pada lingkungan fisik, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk identitas lokal yang kuat di tengah arus perubahan yang terus menerus.

3. Terjadinya Konflik dengan pemerintah dan Korporasi

Dinamika problematik ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan masyarakat lokal dalam melindungi lingkungan dan hak tradisional dengan agenda pembangunan yang diperjuangkan oleh pemerintah dan korporasi. Perbedaan pandangan dan prioritas antara pihak-pihak terlibat menciptakan konflik, di mana pemerintah dan korporasi mendorong proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan ekonomi dan infrastruktur, sementara masyarakat Kendeng menekankan perlunya melindungi lingkungan, warisan budaya, dan hak-hak tradisional mereka. Dialog terbuka dan konstruktif diperlukan untuk memahami kekhawatiran masyarakat dan mencari solusi yang memadukan sebanyak mungkin kepentingan.

Pengembangan mekanisme partisipatif menjadi kunci dalam menciptakan pemahaman bersama. Ketegangan dan konflik, sebagai elemen integral perubahan sosial, menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan, hak asasi manusia, dan dampak jangka panjang pembangunan. Pemerintah dan korporasi harus melihat konflik sebagai peluang untuk menyempurnakan kebijakan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat tanggung jawab sosial mereka. Tindakan konkret seperti dialog publik, konsultasi dengan masyarakat, dan evaluasi dampak sosial menjadi 14 esensial untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya, penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur.

Simpulan

Gerakan Petani Kendeng muncul sebagai respons terhadap proyek pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, yang dianggap dapat merugikan lingkungan, mengancam mata pencaharian petani, dan mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat. Dalam melawan proyek tersebut, petani Kendeng mengimplementasikan berbagai strategi dan metode yang mencakup demonstrasi, tindakan hukum, gerakan sosial, advokasi, dan keterlibatan kebijakan. Tindakan ini mencerminkan ketahanan dan tekad petani dalam melindungi tanah, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Gerakan Petani Kendeng tidak hanya memprotes proyek pabrik semen di Pegunungan Kendeng, tetapi juga memberikan respons aktif terhadap rencana serupa di Rembang. Mereka menyuarakan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan sektor pertanian, serta menunjukkan ketegasan dalam menolak proyek tersebut.

Argumentasi mendalam mereka mencakup aspek ketidak-konsultasian pemerintah dengan masyarakat sebelum memberikan izin, dampak negatif terhadap lahan pertanian, dan keberlanjutan lingkungan. Dampak gerakan dan perlawanan masyarakat Kendeng terhadap struktur sosial lokal melibatkan peningkatan partisipasi dan solidaritas masyarakat, meningkatnya kesadaran lingkungan, dan penguatan identitas lokal. Konflik dengan pemerintah dan korporasi muncul sebagai bagian dari dinamika ini, menekankan perbedaan pandangan dan kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak yang mendukung pembangunan. Pentingnya dialog terbuka, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan evaluasi dampak sosial menjadi esensial untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Gerakan Petani Kendeng telah menunjukkan bahwa upaya kolektif dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial yang membawa dampak positif pada partisipasi masyarakat, identitas lokal, dan perlindungan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Asrawijaya, E. (2020). Gerakan Ekopopulisme komunitas Samin melawan perusahaan semen di pegunungan Kendeng. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 35–47.
- Asrawijaya, E. (2021). GERAKAN PETANI KENDENG DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN PANGANNYA. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 137-147.
- Asrawijaya, E. (2021). Gerakan Petani Kendeng Dalam Mempertahankan Kedaulatan Pangannya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 1(3), 138-139.
- Firsta Aditya Putri, D. B. (2020). STUDI LITERATUR TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN THE POWER OF TWODI SD.

Jurnal Educatio FKIP UNMA, 605-620 .

- Galih, S. (2017). Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Kendeng Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Tahun 2014- 2017 (*Doctoral dissertation*, Faculty of Social and Political Science).
- Harnanto, R. A., Ummah, A. I., Rekavianti, E., & Ratnasari, A. (2018). Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(1), 1-16.
- Hidayatullah, U., Rini, H. S., & Aarsal, T. (2016). Analisis peta konflik pembangunan pabrik pt. semen indonesia di kecamatan gunem kabupaten rembang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 5(1), 10-21.
- Kurniawan, A. W. (2018). Gerakan petani dalam pro kontra pembangunan pabrik semen di Desa Brati Kecamatan Kayen KABUPATEN Pati (*Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga).
- Pratama, A. Y., & Sumardjoko, B. (2018). Perlawanan Politik Petani Pegunungan Kendeng Utara Dalam Menolak Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang, 16 Provinsi Jawa Tengah (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Solihin, M., & Kurnia, N. (2017). Pemaknaan Konflik Pabrik Semen Kendeng dalam Framing Media Berita Online kompas. com dan suara merdeka. com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 16-27.
- Sufyan, A. (2015). Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Yuliyatun, Y. (2017). SIKAP KEPEMIMPINAN TOKOH AGAMA DI TENGAH MASYARAKAT KONFLIK (Studi Kasus Pendampingan Tokoh Agama pada Masyarakat Konflik Kendeng di Rembang). *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1).
- <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-4-teori-konflik-menurut-paraahli-208zpSOGhVq>
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/6/22/117/konflikpembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng.html>
- <https://www.walhi.or.id/perjuangan-petani-kendeng-memperkuat-gerakanpenyelamatan-kawasan-karst-di-indonesi>